

CITA-CITA SOSIAL ISLAM: Menguak *Mabadi' Khairu Ummah* NU



Istimewa

Abd A'la

Asisten Direktur I Program Pascasarjana
IAIN Sunan Ampel Surabaya

Salah satu fenomena yang cukup menonjol dalam kehidupan kontemporer adalah memudarnya kehidupan sosial yang mencerminkan kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Keterbelakangan, ketidakadilan, konflik sosial dan kekerasan dalam beragam bentuknya menjadi kecenderungan kehidupan yang dapat ditemui dengan mudah di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri kita tercinta.

Kenyataan itu memperlihatkan dengan jelas bahwa kehidupan kontemporer masih jauh dari cita-cita sosial sebagaimana yang diharapkan bangsa Indonesia secara khusus, dan umat manusia secara keseluruhan. Ide perdamaian, dan

segala nilai-nilai positif sejenis yang pada awalnya diharapkan akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dalam berbagai dimensinya (termasuk kehidupan sosial) ternyata belum mampu diwujudkan secara konkret di jagad raya. Sebab sampai batas-batas tertentu, pola kehidupan sosial yang berjalan saat ini dapat dikatakan tidak lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Bahkan pada titik-titik tertentu, justru ia menampakkan wajahnya yang jauh lebih buruk.

Dilihat dari sudut manapun, fenomena yang berkembang ini merupakan persoalan kemanusiaan yang sangat mengerikan dan perlu dicari jalan keluarnya. Sebab pengabaian terhadap kenyataan ini akan memalingkan umat manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya. Dalam konteks itu, bahasan tentang nilai-nilai dan ajaran agama tentang persoalan tersebut mutlak dikedepankan. Sejalan dengan itu, pola keberagamaan mereka perlu juga diangkat. Hal ini merupakan kemestian yang harus dilakukan karena agama dan keberagamaan ikut andil dalam membentuk pola pandang, sikap, dan perilaku manusia dalam kehidupan yang mereka jalani.

Tulisan ini mencoba mengangkat persoalan-persoalan tersebut dari perspektif nilai-nilai Islam. Bahasan ditekankan kepada nilai dan ajaran Islam tentang

kehidupan yang harus dibangun umat Islam serta realitas kehidupan yang mereka jalani. Dari dua aspek itu kemudian ditawarkan suatu rekonstruksi yang diasumsikan dapat menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang sangat mendasak untuk segera ditangani ini. Dalam kerangka itu pula, tulisan ini ingin mendiskusikan potensi dan peran Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengemban misi besar tersebut.

Kehidupan dalam Perspektif Islam

Nilai dan ajaran Islam secara keseluruhan mencerminkan suatu pandangan yang sangat positif terhadap kehidupan. Hal itu dapat dilacak dari ajaran Nabi dan Al-Qur'an yang pada prinsipnya bertujuan untuk tindakan dalam kehidupan di dunia.¹ Keberadaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang harus selalu mengabdikan kepada-Nya meletakkan manusia pada peran untuk mengembangkan prestasi dalam kehidupan ini. Artinya, kehidupan harus dibangun dan dikembangkan. Kehidupan harus dijadikan lahan pengabdian kepada Tuhan sebagai manifestasi dari upaya menuju keberagaman yang *kaffah*.

Dalam perspektif Islam, bentuk kehidupan yang harus dibangun dan dikembangkan adalah suatu kehidupan yang sesuai dengan karakter kehidupan itu sendiri dan dengan manusia sebagai

subyeknya. Sesuai dengan *nature* berarti sifat-sifat dasar alam dan kehidupan perlu dijadikan referensi dalam mengolah dunia. Sifat-sifat alam yang selalu bergerak, berubah, dan dinamis menjadi keniscayaan untuk diaplikasikan dalam membangun dunia dan kehidupan. Sedangkan sesuai dengan tabiat manusia, hal ini mengindikasikan kehidupan harus mampu mengakomodasi kebutuhan manusia sebagai makhluk spiritual dan rasional, serta sebagai makhluk yang terdiri dari fisik dan psikis.

Sikap dasar Islam tersebut dapat dilacak secara memadai dari "drama kosmis" turunya Adam (as) dan istrinya ke jagad raya. Sebelum diturunkan, mereka berdua (khususnya Adam) telah dibekali seperangkat ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Baqarah [2]: 32. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah mengajarkan Adam tentang nama-nama segala sesuatu.

Pengetahuan dan kemampuan manusia—yang dalam ayat itu direpresentasikan oleh Adam—dalam memberi nama kepada benda-benda berarti adanya kemampuan yang dimiliki makhluk ini untuk menemukan sifat-sifat benda, hubungan timbal-balik, dan hukum-hukum tabiatnya. Melalui pengetahuan itu, manusia menjadi berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab, ia memiliki pengetahuan yang kreatif dan

¹ Lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1982), h. 14

² Fazlur Rahman, "The Qur'anic Concept of God, Universe and Man" dalam *Islamic Studies*, (Vol.

ilmiah mengenai benda-benda, atau manusia itu sendiri.² Dengan pengetahuan itu, manusia dapat memahami gejala alam, menganalisis, dan mengontrolnya. Semua itu merupakan modal dasar yang cukup berarti bagi manusia dalam mengolah dan mengembangkan kehidupan di dunia.

Di samping itu, manusia adalah *theomorphic being* yang memiliki intelegensi, kehendak, dan kemampuan mengungkapkan. Kapabilitas tersebut membuat manusia dapat membedakan kebenaran dari kesalahan, atau kenyataan dari ilusi, dan dapat memilih secara bebas pilihan-pilihan tersebut, serta dapat mengungkapkan hubungan antara yang bersifat wahyu dan manusia.³ Potensi dan kemampuan itu perlu diasah dan dikembangkan terus sehingga atribut yang disandangnya sesuai dengan nilai-nilai yang dikandungnya.

Karena itu, manusia dengan potensi dan kemampuannya dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan kehidupan dalam bingkai nilai agama dan fitrah manusia itu sendiri. Umat Islam sebagai subyek utama ajaran Islam bukan sekadar dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan teknologi yang canggih. Namun mereka juga diwajibkan untuk memaknai kehidupan serta meng-

arahkannya kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu membangun dan mengembangkan kehidupan sesuai dengan cita-cita sosial Islam.

Berkaitan dengan itu, Quraish Shihab menandakan, cita-cita sosial dalam agama Islam—sebagaimana diajarkan al-Qur'an—adalah membangun bayang-bayang surgawi di bumi persada.⁴ Dengan kata lain, kehidupan surga yang penuh kesejahteraan, kenyamanan, kesetaraan, ketenangan, kedamaian dan sebagainya perlu dijadikan rujukan serta dibumikan dalam kehidupan ini.

Untuk menunjukkan cita-cita sosial tersebut, Shihab merujuk kepada surah Thaha [20] ayat 118–119. Berdasarkan ayat ini (dan juga ayat lain dalam surah al-Waqi'ah), kita dapat menyimpulkan bahwa Adam bersama istrinya ditempatkan di surga sebelum diturunkan ke dunia adalah dalam rangka mengemban amanah tersebut. Mereka berdua—serta umat manusia secara keseluruhan—dituntut dapat mewujudkan kondisi semacam itu di permukaan bumi.⁵ Upaya itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa al-Qur'an yang lain merupakan konkretisasi dari peran manusia sebagai khalifah Allah di jagad raya. Melalui peran dasar ini, manusia (sebagaimana dinyatakannya surah al-Baqarah [2]: 30, dan surah

VI, No.1, 1967.), h. 10–11

² Lihat Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam*, (London: George Allen & Unwin Ltd, 1975), h. 18-19

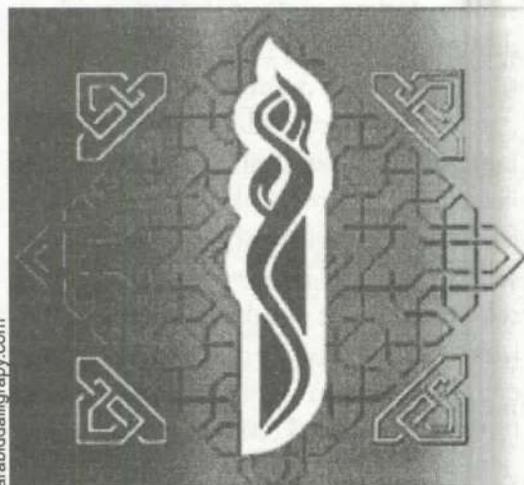
³ Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan XI, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h. 241

Hud [11]: 61) ditugaskan untuk “memakmurkan” dunia.

Pemakmuran dunia, pengelolaannya, dan upaya-upaya yang sejenis dalam kerangka kekhalfahan manusia merujuk kepada makna yang nilai-nilai egalitarianisme, transformatif, dan berwawasan lingkungan. Karena tanpa nilai-nilai ini, kekhalfahan sebagai representasi upaya melabuhkan nilai-nilai ilahiyah dan sifat-sifat Tuhan tidak mungkin dapat direalisasikan ke dalam wujud nyata. Dalam ungkapan yang lugas, hal itu mengartikan bahwa hubungan manusia dengan alam, atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara tuan dengan budaknya. Interaksi itu lebih merupakan suatu kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT.⁶ Hubungan manusia dengan yang lain merupakan proses dialogis dalam rangka menyempurnakan fungsi kekhalfahannya. Dengan demikian, manusia dalam melakukan hubungan dengan sesama lebih merupakan hubungan subyek-subyek. Sedang dalam mengelola alam, hubungannya diletakkan pada keserasian dan keselarasan sehingga alam dan lingkungannya tetap lestari, serta disikapi sebagai titipan Sang Pencipta untuk diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.

Atas dasar itu, nilai dan ajaran Islam mengenai cita-cita sosial tersebut merupakan persoalan teologis sehingga memiliki signifikansi yang tidak kalah penting dengan ajaran agama yang lain, semisal aspek ritual maupun akidah. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejak awal ketauhidan yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. sangat terkait dengan humanisme serta rasa keadilan sosial dan ekonomi yang intensitasnya tidak kurang dari intensitas ide ketauhidan itu sendiri.⁷

Karena aktualisasi cita-cita sosial dalam kerangka kekhalfahan manusia itu merupakan persoalan teologis, maka sebagai konsekuensinya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban manusia atas kekhalfahan mereka dalam mewujudkan cita-cita sosial tersebut. Umat Is-



arabidalligraphy.com

⁵ Ibid.

⁶ Lihat Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran...*, h. 159

⁷ Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1979), Edisi kedua,

lam yang enggan untuk berkiprah dalam hal itu, maka mereka akan menanggung akibatnya. Minimal, mereka belum berhak untuk disebut sebagai muslim—apalagi mukmin—dalam pengertian yang sebenarnya.

Realitas Kehidupan:

Antara Harapan dan Kenyataan

Cita-cita sosial yang dipaparkan sebelum ini lebih bersifat nilai dan ajaran. Sedang pada tingkat praktik, kita melihat—suka atau tidak suka—suatu kehidupan yang masih sangat jauh dari substansi ajaran tersebut. Alih-alih terjadinya kesejahteraan, perdamaian, keadilan dan nilai yang seumpamanya, kita justru dihadapkan pada kenyataan di mana mayoritas umat Islam secara khusus, dan manusia secara umum masih berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, baik di tingkat nasional maupun dalam skala global.

Tanpa menafikan terjadinya beberapa kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia secara umum, dan umat Islam Indonesia secara khusus, fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa sampai saat ini persoalan-persoalan mendasar terus mendera bangsa. Industrialisasi, misalnya, yang berkembang pesat di negeri ini ternyata tidak mampu melepaskan diri dari

baju ideologi yang dianutnya, yaitu developmentalisme, kapitalisme, atau apalah namanya. Ideologi ini telah mengantarkan manusia kepada gagasan bahwa manusia sebagai pusat segalanya, serta pada saat yang sama hilangnya ketergantungan mereka kepada hal-hal yang transenden yang ada di luar diri mereka. Dengan demikian, manusia menjadi tercerabut dari fitrah mereka sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi: transendental dan sekular.⁸ Akibatnya, mereka lalu tidak mampu memaknai kehidupan dan menyadari tujuan hidup yang sebenarnya.

Di samping itu, menurut Fromm, yang terjadi dalam masyarakat industri (akibat ideologi yang mereka anut seperti yang mulai terjadi di Indonesia) adalah hilangnya tradisi, nilai-nilai sosial, dan keterikatan sosial dengan sesama. Mereka lalu merasa terisolir, hidup dalam anomie.⁹ Dalam kondisi seperti itu, manusia mudah terjebak dalam kehidupan yang rentan konflik dan pertentangan, serta kekerasan menjadi bagian yang nyaris melekat dalam negara dan kehidupan masyarakat. Konkretnya, sebagai dampak langsung atau tidak langsung dari pola yang kita anut saat ini, disorganisasi sosial telah menjadi gejala umum yang berkembang di kalangan masyarakat. Patalogi ini dapat

h. 12

⁸ Lihat Muhammad AS Hikam, "Kekerasan Negara, Militer, dan Budaya Politik dalam Ideologisasi Pembangunan di Indonesia" dalam dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Grasindo-P3M, 2000), h. 118–119

⁹ Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka

menimbulkan rasa asosial, tidak memperdulikan kepentingan orang lain sebagaimana juga dapat memicu terjadinya frustrasi.¹⁰ Kondisi semacam itu membuat disharmonisasi sosial, keresahan dan dampak-dampak yang mengiringinya menjadi begitu dekat dengan kehidupan masyarakat.

Masalah ekonomi juga merupakan persoalan yang harus dihadapi bangsa ini. Sekitar tiga puluh juta orang di tingkat nasional—yang tentu sebagian besar terdiri dari umat muslim—masih merupakan kelompok miskin. Hal ini menunjukkan bahwa (sejak rezim Orde Baru berkuasa sampai penguasa saat ini) kesenjangan ekonomi relatif belum mengalami pengurangan yang signifikan.¹¹ Fenomena semacam itu tampaknya terus berlangsung kendati mungkin mengalami metamorfosis, dalam bentuk dan pola yang berbeda. Kesejahteraan masyarakat lebih sekadar angan-angan yang masih terus menggantung.

Sulitnya pencapaian kesejahteraan ini berdampak jauh pada berkembangnya kecemburuan sosial yang pada gilirannya akan kian memperuncing persoalan bangsa yang terus menganga. Ironisnya, sikap partai politik dan kaum elitnya—sampai derajat tertentu—justru larut dalam

kondisi yang tidak kondusif tersebut. Sebut saja para anggota MPR yang sejak rezim Orde Baru sampai sekarang hanya berbeda dalam gaya. Sedang esensi tetap sama; mereka tidak pernah benar-benar mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakili. Semangatnya juga tetap sama; semangat preman jalanan.¹² Demikian pula partai-partai politik yang ada masih belum mampu sepenuhnya menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat. Para elit masih terkesan sibuk berkutat dengan kepentingan diri dan kelompok sendiri. Mereka lebih terfokus pada peneguhan atau perebutan kekuasaan. Maka senyatanya Indonesia tidak (belum) memiliki politisi-politisi yang punya kepedulian untuk bersama-sama memperbaiki situasi bangsa dan negara.¹³ Konkretnya, mereka lebih memperhatikan upaya mempertahankan atau meraih kursi daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, atau negara. *Politicking* telah menjadi gejala fenomenal yang nyaris dapat ditemui dalam segala aktivitas politik yang berjalan di tanah air. Kaum elit dan diamini para makmum yang terdiri dari elit lokal dan sebagian masyarakat sibuk memperkaya diri. Korupsi kian mewabah, penyalahgunaan kekuasaan dan sejenisnya terus berlangsung.

Pelajar, 2000), Cetakan I, h. 143

¹⁰ Lihat Soedjito S., "Kecenderungan Perkembangan Masyarakat" dalam Soedjatmoko et. al., *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000: Sebuah Bunga Rampai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), Cetakan I, h. 88-89

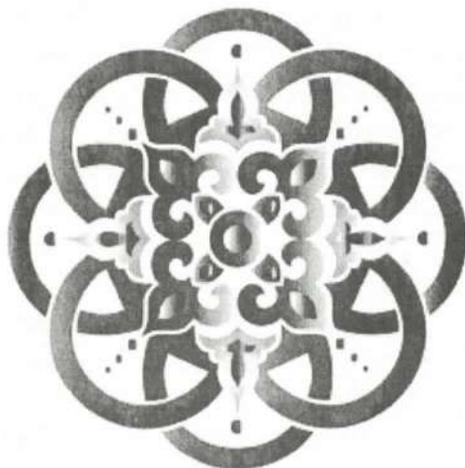
¹¹ Rizal Ramli, "Kesenjangan Sosial-Ekonomi sebagai Basis Munculnya Kekerasan" dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Grasindo-P3M, 2000), h. 3

¹² FX Rudy Gunawan, "Premanisme (politik) Para Anggota MPR" dalam *Jurnal Budaya dan Filsafat Mitra*, (Edisi 09 Desember 01-Februari 02), h. 29

Kondisi tersebut masih diperparah lagi oleh pola pendidikan yang sampai saat ini masih menegara dan terkesan formalistik. Pendidikan yang berjalan sampai saat ini masih sarat dengan muatan-muatan titipan dari penguasa atau kepentingan tertentu di luar kepentingan pendidikan itu sendiri. Sebagai akibatnya, pendidikan tidak mampu mewariskan suatu pengetahuan yang liberatif-transformatif dan penanaman moralitas yang hakiki. Hal itu masih ditambah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah yang membuat mereka kian tidak berdaya dan benar-benar terpinggirkan.

Di tingkat internasional, tatanan kehidupan yang berjalan juga belum mencerminkan cita-cita sosial sebagaimana didambakan umat manusia. Kita dihadapkan dengan meningkatnya pengrusakan lingkungan, kemiskinan yang menurut *World Bank* mencapai 1,2 milyar orang, aborsi yang meluas, kehancuran keluarga, kehamilan di luar nikah yang berjumlah sekitar 14 juta anak remaja, pelbagai perang yang memakan jutaan korban, sikap rasisme, diskriminasi dan fanatisme, serta kejahatan dan penindasan dalam bentuk yang lain.¹⁴

Yang lebih mengesankan, kekerasan dan sejenisnya telah dijadikan *trend* sebagian kelompok dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Pada satu pihak, kelompok-kelompok radikal—



arabicalligraphy.com

yang sebagiannya terdiri dari umat muslim—hadir di mana-mana, mencengkeramkan kuku-kuku mautnya di berbagai belahan dunia. Zionis dengan cara mereka sendiri juga mengedepankan pola yang serupa. Di pihak lain, negara-negara adi daya justru berbuat tidak kalah biadabnya dibandingkan dengan perilaku yang dilakukan kelompok radikal dan kaum Zionis. Mereka mengemas kebrutalan mereka dengan humanisme, demokrasi, atau hak-hak asasi manusia. Namun semua itu hanya sekadar retorika yang tidak berlabuh secara nyata dalam sikap dan perilaku mereka. Inilah wajah buram dunia kita saat ini.

Menuju Rekonstruksi yang Transformatif

Menajamnya ketidakadilan, kekerasan dan sejenisnya menyudutkan umat

¹³Lihat *Harian Kompas*, (Rabu 1 Mei 2002), h. 6

¹⁴Johan Hasan, "Dunia Global yang Menderita dan Tanggung Jawab Agama Agama" dalam *Jurnal Budaya dan Filsafat Mitra*, (Edisi 09 Desember 01-Februari 02), h. 14

manusia kepada kenyataan bahwa manusia kontemporer (nyaris) kehilangan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas. Agama sebagai sumber moralitas telah direduksi melalui pola keberagamaan parsial yang sampai batas-batas tertentu tidak mampu merepresentasikan nilai-nilai agama yang sebenarnya.

Dalam perspektif realitas kesejarahan umat Islam, munculnya keberagamaan parsial (yang membuat mereka kurang berdaya dalam menghadapi kehidupan kontemporer dan terjebak dalam pola-pola reaktif) berujung kepada kekurangmampuan mereka dalam memahami ajaran dan nilai agama secara menyeluruh. Mereka belum menangkap adanya interdependensi yang kukuh antar disiplin dan ilmu keislaman. Sebagai contoh, dasar-dasar keilmuan Islam, teologi, fiqh dan akhlak yang berkembang sampai saat ini belum disikapi sebagai unsur-unsur yang saling mendukung satu sama lain. Keimanan dianggap sekadar berkaitan dengan persoalan-persoalan transendental dan metafisik. Fiqh dipahami sebagai representasi keislaman yang fundamental. Sedang akhlaq hanya dilirik sebagai aksesori untuk melengkapi keberagamaan umat Islam.

Dampak paling nyata dari pemahaman seperti itu adalah berkembangnya keberagamaan parsial yang lebih menekankan kepada aspek legal-formalistik. Pelaksanaan ritual menjadi kemestian,

tapi pemahaman nilai-nilai substansial yang terdapat dibalik ibadah menjadi terabaikan. Bahkan lebih jauh, pola keberagamaan ini dapat berubah menjadi pola keberagamaan yang ekstrinsik. Agama dijadikan alat untuk pencapaian kepentingan. Agama disikapi sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan, serta digunakan untuk menunjang motif-motif lain di luar agama itu sendiri.¹⁵ Pada saat yang sama, kondisi keberagamaan yang bersifat permukaan itu telah membuat sebagian manusia yang lain kian lari dari agama. Sebab dalam pandangan mereka, agama hanya berurusan dengan persoalan kewajiban, halal-haram, surga-neraka, dan pola-pola pandang lain yang dikotomis.

Dalam dua kondisi tersebut, peran hakiki agama menjadi mandul. Agama tidak dapat menanamkan nilai-nilai moralitas yang dapat dijadikan pijakan umatnya dalam menjalani kehidupan mereka dalam berbagai dimensinya. Sebagai konsekuensinya, manusia hanya hidup dengan fisik dan rasionalisme mereka yang kering, atau rutinitas keagamaan yang kurang bermakna. Akibatnya, manusia –persis seperti dikatakan Hobbes –lalu menjadi *homo homini lupus*, sebagai pemangsa manusia yang lain dan perusak lingkungan yang paling rakus. Maka ketidakadilan, eksploitasi manusia terhadap sesama dan lingkungan, dan semacamnya menjadi fenomena dominan

¹⁵Lihat Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*, (Cetakan Pertama, Bandung: Mizan, 1986), h. 26

dalam kehidupan.

Fenomena ini meniscayakan umat Islam untuk merekonstruksi pola pandang dan keberagamaan yang selama ini mereka jalani. Agama sebagai salah satu unsur sentral yang membentuk sikap dan perilaku manusia perlu didekati kembali melalui pembacaan otentik dan kreatif. Melalui pembacaan ini, agama diharapkan dapat berperan maksimal dalam kehidupan, serta sekaligus dapat membentuk pola keberagamaan yang utuh dan transformatif.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyatuan kembali disiplin keilmuan klasik –teologi, fiqih, dan akhlak – dalam satu kerangka pemahaman yang utuh. Melalui pemahaman yang utuh ini, keimanan hendaknya dipahami sebagai suatu kepercayaan yang harus dilabuhkan dalam kehidupan konkret dalam bentuk pengembangan moral. Demikian pula, ibadah-ritual perlu didekati sebagai aspek yang tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tanpa disandingkan dengan pesan dan makna substansial yang ada di balik ibadah tersebut.

Pemahaman yang utuh itu kemudian hendaknya dikonkretkan dalam pola keberagamaan yang intrinsik. Agama disikapi sebagai komitmen yang komprehensif, sebagai faktor pemadu, dan motif-motif yang dapat mengintegrasikan serta menggerakkan¹⁶ keseluruhan sikap dan

perilaku. Dengan demikian, setiap sikap, langkah dan perilaku umat Islam akan selalu dibimbing oleh nilai-nilai universal agama. Mereka tidak dapat mengabaikan serta tidak dapat lari dari nilai dan ajaran tersebut, karena dilihat dari sudut manapun, ia merupakan bagian *inherent* kehidupan mereka.

Upaya sebagaimana disebutkan ini diharapkan dapat mengantarkan manusia kepada nilai-nilai ketakwaan; suatu sikap atau kualitas pikiran yang dengan kondisi itu seseorang mampu membedakan kebenaran dari kesalahan, serta ia berusaha untuk selalu berada dan melakukan kebenaran.¹⁷ Ketakwaan individual ini perlu dikembangkan menjadi ketakwaan sosial melalui komunitas yang di dalamnya telah tertancap kukuh nilai-nilai tersebut sehingga dapat benar-benar membumi dalam kehidupan. Membuminya kondisi tersebut diharapkan akan memberikan peluang besar bagi mereka untuk mewujudkan cita-cita sosial sebagaimana telah menjadi komitmen baku dalam al-Qur'an.

Posisi dan Peran NU

Rekonstruksi pemahaman agama menuntut umat Islam untuk menelaah kembali –menghargai dan mengkritisi – khazanah intelektual keislaman yang mereka miliki. Kesejarahan merupakan salah satu modal dasar yang dapat meng-

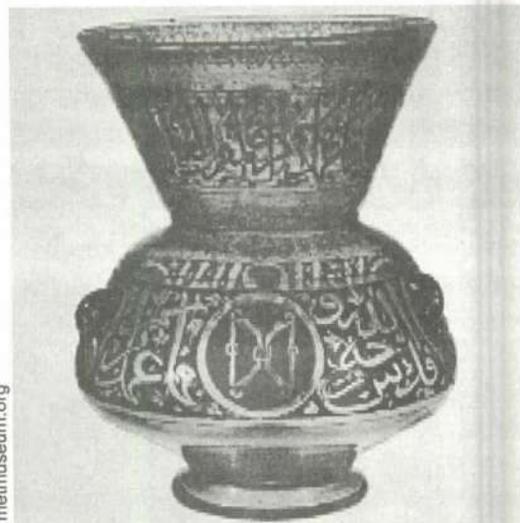
¹⁶ Lihat *Ibid.*

¹⁷ Fazlur Rahman, "Islam and Political Action: Politics in the Service of Religion", dalam Nigel Biggar et.al. (eds.), *Cities of Gods: Faith, Politics and Pluralism in Judaism, Christianity and Islam*, (New York: Greenwood Press, 1986), h. 155

antarkan mereka kepada pemahaman yang utuh dan sekaligus kontekstual. Sebab sejarah akan mengantarkan mereka kepada kekayaan warisan nilai-nilai dan ajaran Islam dari sumbernya yang otentik dan interpretasi ulama yang otoritatif. Melalui khazanah itu, mereka dapat memaknainya secara kontekstual, dan mengembangkannya secara kreatif dan sekaligus tetap otentik.

Atas dasar itu, kesejarahan umat menjadi sesuatu yang sangat bernilai yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Dalam bahasa yang lain hanya dengan *al-muhafazhatu alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah* mereka dapat menjadikan umat Islam sebagai umat yang dinamis, kreatif, dan otentik yang tidak kehilangan jati dirinya, serta dapat menjadi modern. Melalui pola itu pula, mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi terciptanya kehidupan yang sesuai dengan fitrah dan kekhalifahan manusia dalam bentuk terwujudnya cita-cita sosial.

Nahdlatul Ulama (NU) dengan segala nilai dan prinsip yang dipegangnya sebenarnya memiliki kesempatan yang cukup besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Organisasi sosial keagamaan ini dengan prinsip dasar yang dimiliki, *ash-shidqu, al-amanah wal wafa bil 'ahd*, dan *at-ta'awun*¹⁸ yang ditujukan untuk membangun gerakan *mabadi' khairu ummah*



metmuseum.org

berada nyaris seutuhnya dengan cita-cita sosial Islam sebagaimana dicandra di atas. Jika prinsip dasar itu digabung dengan nilai-nilai Aswaja yang dianut NU, semisal *at-tasamuh, at-tawazun, at-tawassuth*, dan *al-'adalah*, NU tidak diragukan lagi akan berada di garda paling depan untuk merealisasikan kehidupan yang *enlighten* tersebut.

Khaira ummah sebagaimana digambarkan al-Qur'an sangat erat hubungannya dengan keberadaan umat Islam yang harus menjadi *umatan wasathan*. Dalam perspektif hermeneutik, *khaira ummah* adalah komunitas moderat, *syuhada'* (obyektif, realistis, dan mampu mengontekstualisasikan nilai dan ajaran agama ke dalam realitas), serta kritis dan apresiatif

¹⁸ Lihat Endang Turmudi (ed.), *Nahdlatul Ulama: Ideology, Politics, and the Formation*, (Jakarta: PP Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, 2004), h. 77

terhadap realitas kehidupan yang mereka hadapi. Konkretnya, sebagai *khaira ummah*, umat muslim secara intrinsik dituntut untuk menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahy munkar* yang implimentasinya harus diletakkan dalam kerangka moderasi dan segala nilai-nilai sejenis. Model komunitas semacam ini adalah pola yang ingin dikembangkan NU.

Melalui gerakan *mabadi' khairu ummah*, organisasi yang didirikan pada tahun 1926 itu menjadi tidak terelakkan untuk melihat dan menyikapi secara kritis realitas persoalan yang dihadapi bangsa dewasa ini dan kemungkinan pada masa depan. Pada gilirannya, *jam'iyah* (yang sering diplesetkan sekadar menjadi *jama'ah*) ini dituntut untuk merealisasikan dan mengontekstualisasikan konsep tersebut ke dalam kehidupan yang terus berkembang. Dengan demikian, NU hendaknya memotret secara akurat semisal terjadinya kontestasi antara menguatnya keberagaman dan merebaknya praktik korupsi yang melibatkan tokoh atau orang yang taat beragama. NU perlu menguak secara tuntas akar persoalan semacam itu; penyebab dasar menguapnya nilai-nilai substansial agama dalam pola keberagaman umat.

Hal ini perlu diperhatikan secara intens dan serius sebab dalam realitasnya kesenjangan yang sangat lebar antara harapan dan kenyataan, antara Islam normatif dan Islam sejarah tidak lagi merujuk kepada oknum atau kasus tertentu. Jika kita mau jujur, hal itu sudah menjadi fenomena umum yang melibatkan sejumlah besar umat. Betapa

banyak di sekitar kita muslim yang haji berkali-kali, tapi dia tidak pernah memiliki kepedulian sosial yang kokoh. Demikian pula betapa banyak muslim yang kita kenal yang selalu puasa sunnah dan tekun menjalani semua shalat sunnah tapi sekaligus dia seorang koruptor dalam pengertian yang sebenarnya, bukan sekadar menurut hukum positif dan formal.

Pada gilirannya, semua persoalan itu meniscayakan NU untuk memberikan tawaran solusi dan aksi konkret untuk menuntaskan semua problem tersebut. Dalam perspektif Aswaja, dan gerakan *mabadi' khairu ummah* yang dianut NU, organisasi sosial-keagamaan ini sampai derajat tertentu sejatinya telah memiliki nilai dan prinsip dasar memadai dan pijakan kokoh untuk menyikapi dan menjawab semua persoalan yang dihadapi bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan. Karena itu, persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana melabuhkan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan nyata. Nilai dan prinsip yang dipegang *jam'iyah* perlu diobjektifikasi ke dalam diri warga dan sistem kehidupan; dikembangkan menjadi norma dan aturan yang benar-benar *viable* dan operasional.

Poskrip

Pembumian *blue print* NU untuk mengemban gerakan *mabadi' khairu ummah* sebagai realisasi cita-cita sosial Islam sangat tergantung kepada komitmen para tokoh NU. Dari fenomena yang berkembang dalam kurun lima tahun terakhir ini, ada kecenderungan menguat-

nya nuansa-nuansa politik praktis yang menggelayuti sebagian tokoh sentral NU. Persoalan intern ini tidak diragukan lagi tentu akan menghambat untuk menjadikan NU sebagai garda depan dalam upaya mewujudkan cita-cita sosial Islam. Apalagi jika pola itu juga diikuti oleh para jamaah atau warga NU.

Atas dasar itu, refleksi diri dan sebagainya perlu dilakukan. Para elit dan semua warga tidak berlebihan jika membersihkan kembali niat mereka, mengkritisi pola keberagamaan mereka, dan

kemudian melakukan rekonstruksi yang transformatif. Sekarang sepenuhnya tergantung kepada warga nahdliyin dan para tokohnya untuk memulai kerja besar ini. Dengan komitmen yang kokoh, niat yang tulus, agenda jelas, dan praksis konkret, kita yakin NU mampu mengantarkan umat dan bangsa, serta dapat memberikan sumbangsih nyata kepada seluruh umat manusia menuju kehidupan yang lebih bermoral; adil, jujur, damai, dan sejahtera. *Wallahu a'lam bish Shawab.* ❖

